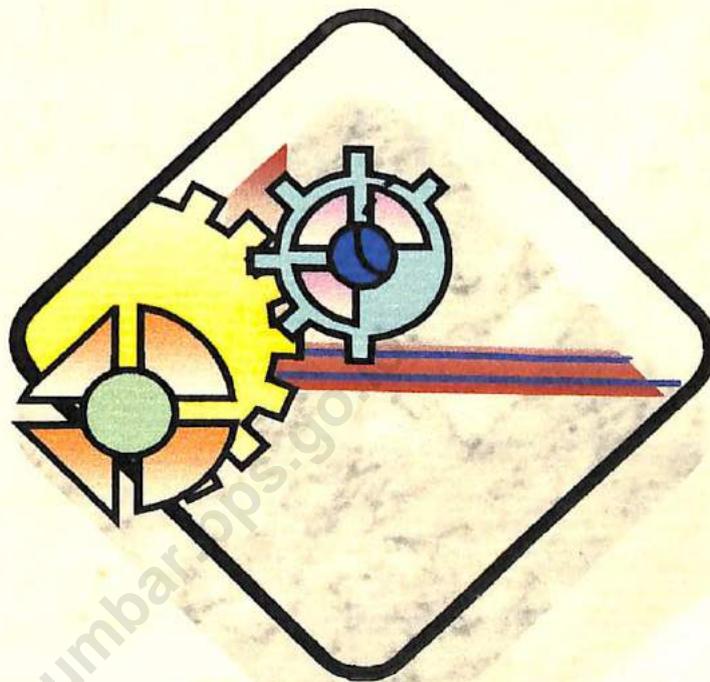




Katalog BPS : 3401.13

*Ringkasan Eksekutif*

# INFORMASI KETENAGAKERJAAN 1998



**BPS**

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat

---

*Ringkasan Eksekutif*

INFORMASI  
KETENAGAKERJAAN  
1998

<https://sumbar.bps.go.id>

---

## KATA PENGANTAR

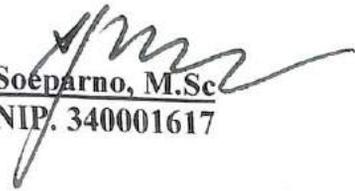
Dalam usaha memanfaatkan hasil Susenas 1998 agar dapat memberikan kegunaan yang lebih nyata bagi pembangunan di bidang kependudukan. Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat memandang perlu untuk melakukan analisa yang berbentuk Ringkasan Eksekutif Informasi Ketenagakerjaan, dengan harapan dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan di Sumatera Barat.

Ringkasan Eksekutif ini merupakan suatu informasi bagi mereka yang bergerak dalam bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, serta mereka yang mempunyai minat terhadapnya. Terlebih lagi minat masalah ketenagakerjaan telah berkembang dengan cepat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bersikap tanggap terhadap suatu masalah penting yang dihadapi oleh bangsanya sendiri.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan ini, dan seluruh pengguna data kami ucapkan terima kasih. Akhirnya kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan dimasa mendatang sangat kami harapkan.

Padang, Nopember 1999

 **Badan Pusat Statistik  
Propinsi Sumatera Barat  
Kepala,**

  
**Soeparno, M.Sc**  
**NIP. 340001617**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
I. Pendahuluan.....	1
II. Penduduk Usia Kerja .....	2-7
II. 1. Komposisi Penduduk.....	2-4
II.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	4-7
III. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	8-10
III.1. Lapangan Usaha .....	8-9
III.2. Status Pekerjaan. ....	9-10
IV. Tingkat Pengangguran.....	11-14
IV.1. Setengah Pengangguran.....	11-13
IV.2. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	13-14
( Ringkasan Data ).....	15
Daftar Pustaka .....	16-17



# 1. PENDAHULUAN

Untuk perencanaan masalah ketenagakerjaan sangat dibutuhkan data yang dapat dipercaya dan cukup terperinci mengenai karakteristik angkatan kerja dan struktur penyebaran tenaga kerja. Sampai saat ini sumber data yang dapat memberikan informasi ketenagakerjaan yang lebih rinci dengan ruang lingkup yang cukup luas adalah yang telah dikelola oleh BPS, yaitu melalui Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Tidak semua data dari sumber-sumber tersebut dapat dibandingkan dalam melihat perkembangan dan perubahan partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan dalam konsep dan definisi serta tidak keseragaman dalam klasifikasi.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia terlihat cukup lengkap dibanding dengan negara berkembang lainnya. Sejak dasawarsa 1970 - an, yaitu Sensus Penduduk 1971 telah diperkaya dengan data ketenagakerjaan. Selain itu karakteristik ketenagakerjaan ini juga dikumpulkan dalam beberapa waktu

*Sumber Data Ketenagakerjaan Diperoleh Melalui Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS )*

melalui Susenas yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahunnya.

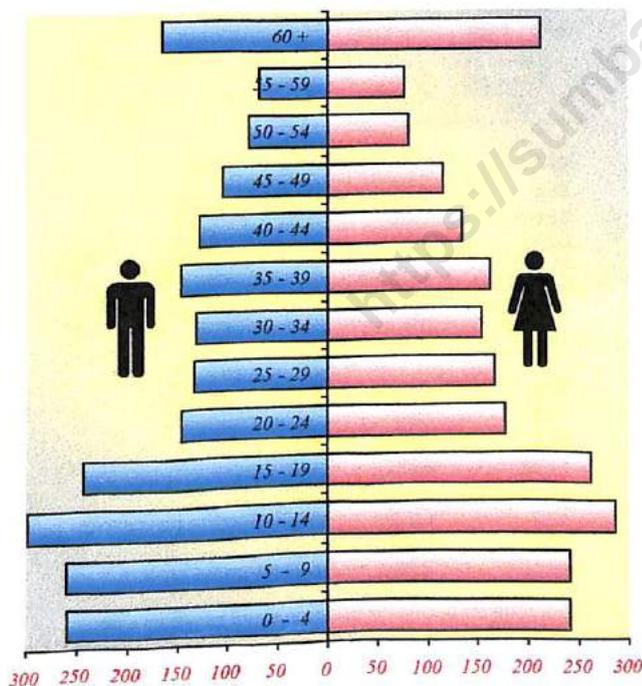
Dengan menggunakan data Susenas fenomena ketenagakerjaan telah banyak dikupas dalam surat-surat kabar, di dalam forum terbatas oleh ahli-ahli di BPS dan dibahas oleh sarjana asing. Namun, masih terasa jarang tulisan-tulisan berdasarkan analisa data yang memusatkan perhatian dalam masalah-masalah ketenaga-kerjaan dan membahasnya secara mendalam di tiap-tiap daerah propinsi. Ringkasan Eksekutif Informasi Ketenagakerjaan ini tujuannya untuk mengisi kekosongan itu dengan memakai data Susenas 1998, antara lain seperti kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, lapangan kerja, status pekerjaan dan jam kerja.

## 2. PENDUDUK USIA KERJA

### 2.1. Komposisi Penduduk Usia Kerja

Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai 14 daerah Tk.II, merupakan salah satu propinsi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Menurut hasil Susenas 1997 jumlah penduduk Sumatera Barat sebesar 4.396.646 jiwa, sedang dari hasil Susenas 1998 sebesar 4.473.250 jiwa dengan laju pertumbuhan sekitar 1,74 %.

Gambar 2.1 :  
Piramida Penduduk Sumatera Barat, 1998 (000)



Kesan pertama yang cukup menarik dari Gambar 2.1, yaitu gambaran komposisi penduduk menurut jenis kelamin terlihat berimbang untuk setiap kelompok umur.

*Jumlah Penduduk Perempuan lebih Besar Pada Kelompok Usia Menengah (15 - 49 tahun)*

Persentase penduduk laki-laki sebesar 48,34 % dan perempuan 51,66 %. Terlihat perbedaan yang kecil pada umur-umur tertentu, misalnya persentase laki-laki lebih tinggi pada kelompok umur muda (0 - 14 tahun) yaitu 51,60 %, sebaliknya persentase perempuan lebih tinggi pada kelompok umur menengah (15 - 49 tahun) yaitu 53,20 %.

Untuk keperluan pengumpulan data statistik, batasan usia kerja yang berlaku adalah 10 tahun. Batasan itu sebenarnya tidak sejalan dengan peraturan atau perundang-undangan berbagai bidang lainnya, seperti bidang ketenagakerjaan (15 tahun) dan bidang kesejahteraan anak. Batasan 10 tahun, sebenarnya tidak sejalan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang baru saja dicanangkan pemerintah. Walaupun demikian penetapan usia kerja 10 tahun juga, dilain pihak, menguntungkan karena dimungkinkan di peroleh data pekerja atau buruh anak yaitu pekerja yang menurut definisi ILO berumur kurang dari 15 tahun.

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia kerja meningkat dari tahun 1997 - 1998, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia kerja bertambah dari 3,42 juta jiwa pada tahun 1997 menjadi sekitar 3,47 juta jiwa pada tahun 1998 atau tumbuh sekitar 1,60%. Sebagai perbandingan, laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan dalam kurun waktu yang sama lebih tinggi, yaitu 1,74 %.

Tabel 2.1 :  
Komposisi Penduduk Usia Kerja  
Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan

Jenis Kelamin Jenis Kegiatan	Banyaknya ( 000)		Kenaikan 1997 - 1998 $\frac{(3) - (2)}{(2) \times 100}$
	1997	1998	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Laki-laki	1617.8	1641.8	1.48
1.1. Angkatan Kerja	1095.5	1106.2	0.98
- Bekerja	1057.1	1053.5	-0.34
- Mencari Kerja	38.4	52.7	37.24
1.2. Bkn. Angkatan Kerja	522.3	535.6	2.55
- Sekolah	380.9	363.1	-4.67
- Mengurus R.Tangga	5.7	8.4	47.37
- Lainnya	135.7	164.1	20.93
2. Perempuan	1798.5	1829.2	1.71
2.1. Angkatan Kerja	733.4	750.9	2.39
- Bekerja	694.9	698.9	0.58
- Mencari Kerja	38.5	52.1	35.32
2.2. Bkn. Angkatan Kerja	1065.1	1078.2	1.23
- Sekolah	427.3	392.8	-8.18
- Mengurus R.Tangga	506.1	525.1	3.75
- Lainnya	131.7	160.3	21.72
Total	3416.3	3471.0	1.60

Relatif cepatnya laju pertumbuhan penduduk usia kerja, terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan struktur umur penduduk Sumatra Barat dalam kurun waktu tersebut.

*Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja Sekitar 1,60 Persen, Lebih Rendah Jika Dibandingkan Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (1,74 persen)*

Jika diperhatikan Tabel 2.1 secara seksama maka akan tampak perbedaan komposisi penduduk usia kerja menurut jenis kelamin. Pertama, jumlah penduduk usia kerja ternyata lebih besar untuk wanita dari pada laki-laki. Ini terjadi pada tahun 1997 maupun 1998. Kedua, kelompok angkatan kerja, yaitu mereka yang tergolong " bekerja " dan " mencari pekerjaan", jauh lebih tinggi untuk laki-laki dari pada untuk wanita. Pada tahun 1998, misalnya, angkatan kerja laki-laki mencapai 1106,2 ribu jiwa atau 67,38 % dari penduduk usia kerja laki-laki, sementara jumlah angkatan kerja wanita hanya 750,9 ribu jiwa atau 41,05 % dari penduduk usia kerja wanita. Relatif rendahnya proporsi tersebut (atau TPAK) untuk wanita terjadi karena proporsi yang mengurus rumahtangga bagi mereka relatif sangat tinggi pada tahun 1998, mencakup 28,71 % dari keseluruhan penduduk usia kerja wanita. Sebagai perbandingan proporsi tersebut untuk laki-laki pada tahun yang sama kurang dari 1 %.

Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa dari 1,9 juta penduduk angkatan kerja, 94,36 % adalah penduduk yang bekerja. Penyerapan tenaga kerja terbesar adalah pada tingkat pendidikan SD / tidak tamat SD, yaitu sebanyak 1,0 juta lebih atau 57,30 %. Bagi lulusan Akademi/ Universitas yang bekerja hanya sebesar 4,61 %. Hal ini menunjukkan suatu gambaran, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan lebih memilih jenis pekerjaan yang diminati.

Tabel 2.2.  
Penduduk Angkatan Kerja  
Menurut Pendidikan, 1998 (x1000)

Pendidikan	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Sekolah	69.2	0.3	69.5
Tdk/Tamat SD	1004.2	27.2	1032.0
SMTP	256.4	18.3	274.7
SMTA	197.8	35.3	233.1
SMTA Kej./D1/D2	143.4	11.1	154.5
Akd/Universitas	80.8	12.5	93.3
Jumlah	1752.4	104.7	1857.1

Selain penduduk bekerja, yang termasuk kedalam Angkatan Kerja adalah yang mencari pekerjaan. Pencari kerja terbesar berpendidikan SMTA, yakni 35,3 ribu (33,71%) kemudian diikuti dengan pendidikan SD kebawah sebesar 27,2 ribu (25,98 %).

*Penyerapan Tenaga Kerja Terbesar adalah pada Tingkat Pendidikan SD/ Tidak Tamat SD, Yaitu Sebanyak 1 Juta atau 57,30 %*

## 2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

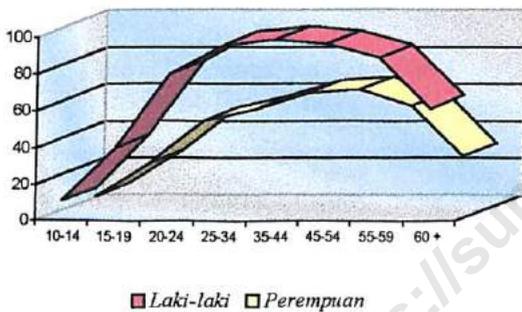
Tenaga Kerja (Man Power) merupakan unsur utama di dalam proses produksi barang dan jasa serta mengatur sarana produksi untuk menghasilkan sesuatu. Anggapan ini didasarkan pada asumsi bahwa karena manusialah yang dapat menggerakkan suatu kombinasi semua sumber - sumber produksi tersebut untuk menghasilkan barang (Simanjuntak, P.J. 1981).

Perlu diingat bahwa istilah partisipasi angkatan kerja berbeda dengan istilah partisipasi kerja. Partisipasi angkatan kerja berarti keikutsertaan dalam atau menjadi angkatan kerja. Jadi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan kepada persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja . Sebaliknya Partisipasi kerja berarti keikutsertaan dalam atau mempunyai pekerjaan ( Employment Rate).

TPAK biasanya rendah untuk kelompok usia muda, kemudian naik secara bertahap sejalan dengan kenaikan umur, sebelum akhirnya turun karena pengaruh usia lanjut.

Pola umum seperti itu juga berlaku di Sumatera Barat sebagaimana tampak pada gambar 2.2. . Pada gambar itu tampak bahwa TPAK relatif lebih sangat rendah pada kelompok usia 10 - 14 tahun . Hal ini dapat dipahami karena penduduk pada usia ini sebagian besar masih berstatus sekolah tanpa melakukan kegiatan ekonomi sama sekali .

Gambar 2.2.  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
Menurut Umur dan Jenis Kelamin 1998



Sebagai catatan, anak yang berstatus sekolah tetapi melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam dalam seminggu, perdefinisi akan tergolong sebagai angkatan kerja. Gambar 2.2. memperlihatkan bentuk huruf " U " terbalik. Pola U terbalik sangat selaras dengan hipotesa tentang siklus penghidupan ( life cicle), yakni manusia pada awal usianya kurang produktif, demikian pula pada waktu usia lanjut, akibatnya mereka tidak sempat mempunyai tabungan, sebaliknya pada usia menengah manusia itu sangat

*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Relatif Sangat Rendah Pada Kelompok Usia 10 - 14 Tahun*

produktif sehingga mempunyai pendapatan yang tinggi dan tabungan yang positif. Seperti terlihat pada gambar 2.2. TPAK mengalami kenaikan cepat dari kelompok usia 10 - 14 ke usia 15 - 19 dan hal itu berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita. TPAK naik terus pada kelompok usia berikutnya sebelum mencapai puncaknya pada kelompok usia 35 - 44 tahun bagi laki-laki atau kelompok 45 - 54 bagi wanita. Sepertinya pola TPAK wanita lepas dari pengaruh masa-masa kemakmuran relatif sebelum anak-anaknya lahir dan sesudah anak-anaknya cukup untuk mencari nafkah sendiri . Pola semacam itu wajar untuk diharapkan karena selama masa usia sebelum 45 tahun mereka sibuk memelihara dan membesarkan anak, sedang kan setelah usia 45 tahun anak telah dewasa untuk melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena ada masa-masa tertentu bagi wanita mempunyai kecenderungan untuk keluar dari angkatan kerja, paling tidak untuk sementara waktu .

Tabel 2.3. memberikan informasi tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut daerah Tk.II, yang menunjukkan adanya variasi yang nyata pada masing-masing daerah Tk.II. Rentang TPAK terletak antara 40,84 % untuk Kotamadya Padang dan 63,56% untuk Kabupaten Swl/Sijunjung. Tingginya TPAK di Kabupaten Swl/ Sijunjung karena banyaknya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, terutama perkebunan, suatu hal yang jelas berdampak terhadap TPAK secara keseluruhan di kabupaten tersebut.

Tabel 2.3 :  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
Menurut Daerah Tk.II, 1998

Daerah Tingkat II	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Kabupaten</u>			
01. Pesisir Sel	62.70	30.74	46.34
02. Solok	70.58	44.96	57.03
03. Swl/Sjj	78.11	49.79	63.56
04. Tanah Datar	66.45	43.28	53.78
05. Pdg. Pariaman	62.15	36.53	48.05
06. Agam	67.43	51.71	59.04
07. Limapuluh Kt.	71.78	47.46	58.82
08. Pasaman	73.82	48.86	60.88
<u>Kotamadya</u>			
71. Padang	62.10	28.73	44.84
72. Solok	67.93	35.43	51.59
73. Sawahlunto	70.00	41.64	54.80
74. Pdg. Panjang	65.71	42.50	53.47
75. Bukittinggi	60.24	39.63	49.64
76. Payakumbuh	67.12	45.69	55.92
Sumatera Barat	67.38	41.05	53.51

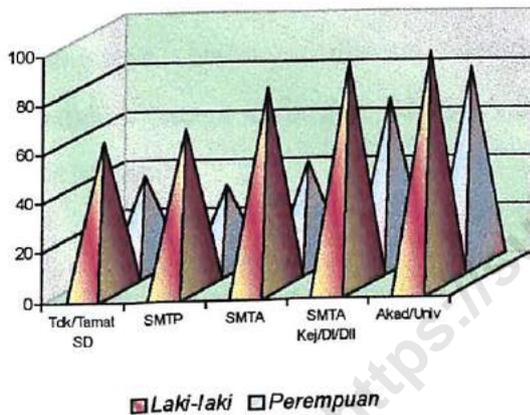
*Rentang TPAK Menurut Daerah Tk.II  
Terletak Antara 40,84 Persen Sampai Dengan  
63,56 Persen*

Rendahnya TPAK di Kotamadya Padang tampaknya lebih sukar untuk di jelaskan apalagi jika diingat bahwa " tingkat ke - makmuran " penduduk dati II tersebut cukup tinggi dan lapangan kerja di luar sektor pertanian sangat beragam. Secara spekulatif gejala itu barang kali dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dengan tingkat kemakmuran yang cukup tinggi ( walaupun tidak merata) cukup besar proporsi penduduk usia muda yang masih berstatus sekolah ( termasuk kuliah atau kalaupun tidak, mereka masih "mampu" untuk menganggur karena memperoleh dukungan ekonomi orang tua ). Kedua, lapangan pekerjaan formal diluar sektor pertanian umumnya membutuhkan pendidikan atau keterampilan yang tinggi, pada hal suatu tuntutan yang belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh kualitas penduduk Kotamadya Padang . Alternatif lapangan pekerjaan yang tersedia disektor informal yang tentunya relatif lebih sukar dimasuki dari pada lapangan kerja di sektor pertanian terutama bagi wanita. Jadi masalahnya berkaitan dengan struktur lapangan yang tersedia.

Pada gambar 2.3 memperlihatkan bahwa secara umum TPAK berkaitan positif dengan tingkat pendidikan ; semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi TPAK. Hal ini berlaku untuk laki - laki maupun wanita. Lebih rendahnya TPAK bagi yang " tamat SMTA " dari pada TPAK

*TPAK Akan Semakin Tinggi Pada Tingkat Pendidikan Yang Lebih Tinggi*

Gambar 2.3 :  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin, 1998



yang " tamat Akademi/Universitas " mungkin berkaitan dengan perbedaan perilaku mereka dalam menerima pekerjaan .Mereka yang "tamam SMTA" mungkin lebih bebas dari pada mereka yang "tamam Akademi/ Universitas" dalam hal menerima pekerjaan yang tersedia tanpa terlalu mengganggu perasaan gengsi mereka.

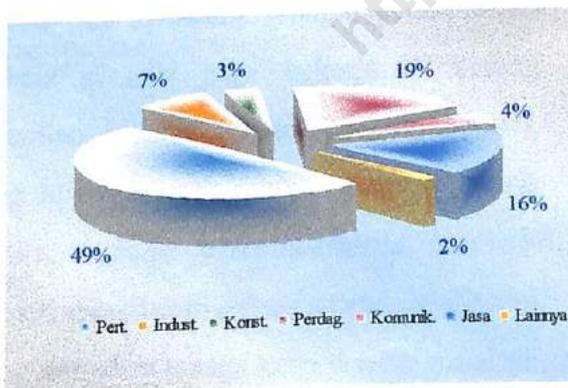
Gambar 2.3 juga memperlihatkan bahwa TPAK lulusan sekolah kejuruan lebih tinggi dari pada TPAK lulusan sekolah umum untuk jenjang yang sama, suatu keadaan yang tidak mengherankan mengingat bahwa sekolah kejuruan memang lebih diarahkan untuk memasuki dunia kerja dari pada sekolah umum. Pola itu berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita.

### 3. LAPANGAN USAHA DAN STATUS PEKERJAAN

#### 3.1 Lapangan Usaha

Pembagian penduduk yang bekerja dan perkembangannya dari masa ke masa menurut sektor sering dianalisa dengan membedakan tiga sektor pokok : Sektor A (pertanian), sektor M ( pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi) dan sektor S (perdagangan, komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya). Menurut beberapa teori ekonomi, proses pembangunan biasanya disertai dengan perpindahan tenaga kerja dari Sektor A ke Sektor M dan S.

Gambar 3.1  
Persentase Penduduk yang Bekerja  
menurut Lapangan Usaha, 1998



Keberhasilan strategi pembangunan sering dikaitkan dengan kecepatan pertumbuhan sektor M yang dianggap erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas angkatan kerja.

*Penduduk Yang Bekerja Pada Sektor Pertanian Proporsinya Lebih Tinggi dari Pada Sektor Lainnya.*

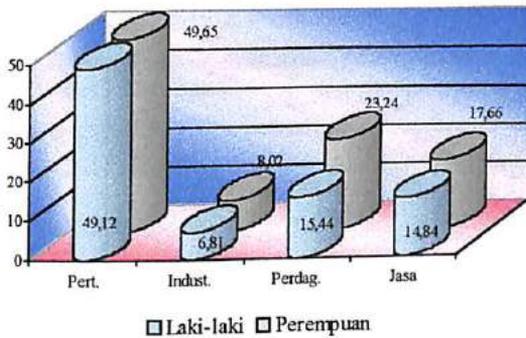
Salah satu ciri dari negara berkembang antara lain, lapangan usahanya masih dominan di sektor A (pertanian). Seperti terlihat pada gambar 3.1, 49,32 % bekerja disektor pertanian. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sekitar 18,55 % dan sektor jasa sekitar 15,97 %.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Squire (1981) bahwa dalam sejarah perkembangan negara-negara maju didapatkan pola bahwa sektor pertanian semakin menurun yang kemudian diimbangi oleh peningkatan peranan sektor industri dan jasa. Pada tahap selanjutnya menurut Galenson (1963) sektor jasa semakin kuat peranannya untuk menggeser peranan sektor industri.

Hal yang menarik lagi jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada Gambar 3.2, ternyata persentase wanita lebih besar dibanding laki-laki terutama sekali pada ke-4 sektor (pertanian, industri, perdagangan dan jasa).

Keadaan ini besar kemungkinan adanya budaya merantau pada masyarakat Minangkabau terutama sekali pada penduduk laki-laki.

Gambar 3.2:  
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha, 1998



Tingginya persentase wanita dari pada laki-laki di sektor pertanian sejalan dengan bahasan berikutnya, yakni tingginya angka setengah pengangguran pada wanita yang diduga sebagai pekerja keluarga. Hal ini berarti jika si suami sebagai petani maka praktis si istri juga bekerja di bidang pertanian. Namun demikian sektor industri, yang justru banyak menyerap tenaga kerja wanita, karena berkembangnya industri-industri yang dalam proses produksinya justru mengutamakan tenaga kerja wanita, misalnya industri makanan, minuman, farmasi, tekstil konveksi dan sebagainya. Nampaknya tenaga kerja wanita Sumatera Barat berangsur mengimbangi peranannya terutama sekali

*Persentase Wanita Yang Bekerja di Sektor Perdagangan Jauh Lebih Tinggi Jika Dibandingkan dengan laki-laki.*

pada sektor industri dan jasa, seiring dengan mulai tumbuhnya industri pada perusahaan jasa yang memberikan prioritas terhadap tenaga kerja wanita.

### 3.2. Status Pekerjaan

Penelaahan status pekerjaan diprediksikan cukup relevan untuk melihat tingkat pembangunan suatu daerah (Oberai, 1978). Cukup beralasan bilamana status pekerjaan **berusaha dengan buruh tetap dan buruh atau karyawan** dianggap sebagai proxy dari pekerjaan berubah ( wage employment) yang dapat dikatakan sebagai indikator sektor modern.

Persamaan lapangan pekerjaan anak dan orang tua merupakan indikasi bahwa mereka bekerja disuatu usaha rumahtangga yang dapat mewakili kegiatan-kegiatan informal tetapi ada berbagai variabel yang dapat dipakai sebagai proxy yang mengenali kegiatan tersebut. Dilain pihak Bhalla ( 1973 : 288) memperkirakan pekerjaan upahan sebagai pekerja sektor modren dan sebaliknya pekerja keluarga digolongkan sebagai pekerja sektor tradisional.

Maka wajarlah kiranya status berusaha sendiri, **berusaha dengan buruh tidak tetap atau anggota rumahtangga dan pekerja keluarga** disebut sebagai proxy kegiatan sektor informal

Tabel 3.1 :  
**Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 1998**

Status Pekerjaan Utama	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sektor Informal</b>	66,94	73,89	69,71
- Berusaha Sendiri	30,03	22,80	27,15
- Berusaha dibantu Buruh tdk tetap	26,58	17,77	23,06
- Pekerja Tak Dibayar	10,33	33,32	19,50
<b>Sektor Modern</b>	23,06	26,11	30,29
- Berusaha dibantu Orang lain	2,76	0,86	2,00
- Buruh / Karyawan	30,30	25,25	28,29
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan Tabel 3.1 tampak bahwa penduduk laki-laki yang bekerja di sektor informal 66,94 %, lebih rendah dari pada penduduk perempuan yaitu sebesar 73,89 %.

*Persentase Status Pekerjaan Yang Yang Tertinggi Bagi Laki-laki Yaitu berusaha Di bantu Buruh Tidak Tetap.*

Persentase yang tertinggi untuk laki-laki adalah mereka yang berstatus berusaha sendiri, yaitu 30,03 %. Meskipun demikian mayoritas dari laki-laki mempunyai pekerjaan yang relatif modern yakni sebesar 33,06 %, sedangkan perempuan 26,11 %. Proporsi penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan lebih didominasi oleh laki-laki dari pada perempuan. Sebaliknya mayoritas perempuan mempunyai pekerjaan yang relatif tradisional ( sektor informal ), yakni sebagai pekerja keluarga dengan persentase sebesar 32,32 %. Dari sini dapat diasumsikan bahwa rata-rata anak perempuan banyak yang bekerja mengikuti jejak orang tuanya, seperti jadi petani atau pedagang dan lainnya.

## 4. TINGKAT PENGANGGURAN

### 4.1. Setengah Pengangguran

Setengah pengangguran, pengangguran terbuka dan produktivitas rendah merupakan segi-segi pemanfaatan tenaga kerja kurang (under utilization) di negara-negara berkembang (Jones, 1976).

Di dalam menyoroti setengah pengangguran (under employment), gejala ini timbul biasanya karena adanya ketidak seimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu yang menimbulkan *A excess supply of labor*, *A* yakni disuatu lapangan pekerjaan jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk dipekerjakan lebih banyak dibanding dengan jumlah orang yang diminta untuk bekerja. Akibat dari keadaan ini seseorang bisa bekerja kurang dari jam kerja atau hari kerja yang dapat dikerjakannya, serta ada keinginan untuk bekerja lebih banyak.

Konsep dan definisi yang sering dipakai untuk setengah pengangguran adalah seseorang yang bekerja kurang dari jam kerja normal, yakni 35 jam seminggu dan ingin menambah jam

*Rata - Rata Jam Kerja Selama Seminggu Bagi Wanita di Bawah Jam Kerja Normal (31,22 jam)*

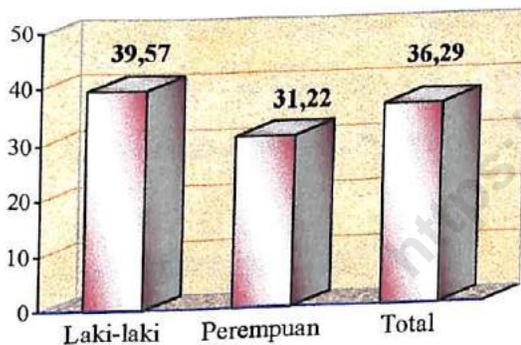
kerja. Sebenarnya istilah ini tidak tepat karena untuk dikatakan setengah pengangguran, selain memiliki jam kerja di bawah normal, juga melakukan hal itu karena bukan atas kemauan sendiri. Seseorang pekerja yang walaupun memiliki jam kerja rendah, katakanlah 10 jam per minggu, tetapi itu dilakukan atas kemauan sendiri, bukan setengah pengangguran. Walaupun demikian karena data yang tersedia mengenai jam kerja tidak dapat dibedakan menurut alasan memiliki jam kerja (atas kemauan sendiri atau terpaksa), maka untuk mudahnya dapat dianggap bahwa penduduk yang memiliki jam kerja rendah sebagai "setengah pengangguran" ( di dalam tanda kutip).

Terdapat usaha untuk merevisi definisi tersebut agar lebih realistis dengan kondisi kita. Dalam definisi baru ini diintrodusir jam kerja normal, untuk sektor pertanian 36 jam seminggu, sedang untuk non pertanian 48 jam seminggu.

Berdasarkan dari besaran jam kerja normal tersebut tenaga kerja diklasifikasikan atas pekerja penuh dan pekerja tidak penuh, dipihak lain terdapat pengangguran penuh dan pengangguran tidak penuh (Depnaker dan Transmigrasi, 1982).

Hasil pengolahan Susenas 1998 ditemukan rata-rata jam kerja selama seminggu yang lalu sebesar 36,29 jam , dengan rincian untuk laki-laki sebesar 39,57 jam, lebih tinggi dibanding perempuan sebesar 31,22 jam (lihat Gbr. 4.1).

Gambar 4.1 :  
Rata-rata Jam Kerja  
Selama Seminggu yang lalu, 1998



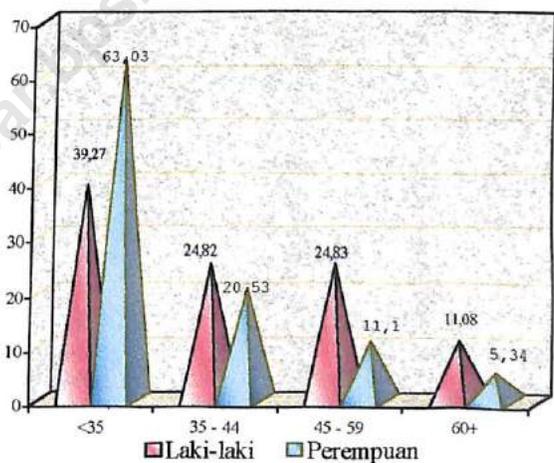
Secara rata-rata penduduk perempuan masih belum bisa bersaing dengan laki-laki yang bekerja sudah di atas jam kerja normal.

Selanjutnya untuk lebih jelas lagi dilihat besarnya setengah pengangguran ( gambar 4.2.) proporsi untuk perempuan sebesar 63.03 % lebih besar dibanding laki-laki yakni

*Tingginya Angka Setengah Pengangguran Pada Perempuan di Duga Karena Banyak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Tak Dibayar*

39,27 %. Sejalan dengan bahasan sebelumnya, yakni tingginya angka setengah pengangguran pada perempuan, diduga banyak yang bekerja sebagai pekerja tak dibayar (unpaid family worker).

Gambar 4.2 :  
Persentase Penduduk Yang Bekerja  
Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya, 1998



Bila dihubungkan dengan pengukuran Depnaker mengenai jam kerja normal untuk sektor non pertanian 48 jam seminggu dan sektor pertanian 36 jam seminggu, nampaknya untuk jam kerja 35 - 44 jam perbedaannya tidak begitu nyata, namun untuk jam kerja 45 - 49 jam terlihat perbedaan yang

cukup tajam antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga untuk mereka yang bekerja sangat panjang (60 jam lebih) tetap didominasi oleh laki-laki, namun tidak mudah dipahami bila dihubungkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Dalam hal ini Jones (1976) menyatakan bahwa pekerjaan marginal, intensitas kerja dan produktivitas kerja per jam sangat rendah, pendapatan rendah dan hanya dapat diperoleh melalui jam kerja sangat panjang. Sebagai contoh dikemukakan pedagang kaki lima, penjual keliling, tukang becak, pembantu rumahtangga dan sebagainya, yang hampir sebagian besar di daerah kota dengan pendapatan rendah tetapi jam kerja panjang.

#### 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu besaran yang merupakan persentase dari jumlah pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa TPT lebih tinggi di daerah kotamadya dan ternyata pula bahwa sebagian besar TPT laki-laki lebih rendah dari pada perempuan baik di daerah kotamadya maupun kabupaten. Ini merupakan petunjuk bahwa sektor pertanian di daerah kotamadya kurang mampu menyerap tenaga

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tertinggi Terdapat pada daerah Kotamadya Padang (13.60%)**

kerja dibanding dengan sektor pertanian yang hampir sebagian besar di daerah kabupaten.

Tabel 4.1.  
Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT )  
Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tk.II 1998

Daerah Tingkat II	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Kabupaten</u>			
01. Pesisir Selatan	5.23	7.33	5.94
02. Solok	2.73	3.20	2.93
03. Swl./Sijunjung	1.26	2.18	1.63
04. Tanah Datar	3.35	6.04	4.53
05. Pdg. Pariaman	4.13	7.57	5.57
06. Agam	2.95	3.30	3.11
07. Limapuluh kota	3.73	4.86	4.22
08. Pasaman	3.50	5.25	4.23
<u>Kotamadya</u>			
71. Padang	10.33	20.22	13.60
72. Solok	8.55	8.58	8.56
73. Sawahlunto	7.20	8.62	7.78
74. Pdg. Panjang	2.30	6.25	3.96
75. Bukittinggi	7.51	7.91	7.68
76. Payakumbuh	5.84	7.18	6.41
Sumatera Barat	4.76	6.93	5.64

Dari tabel 4.1. tersebut nampak bahwa tenaga kerja perempuan belum mampu bersaing dengan tenaga kerja laki-laki, terutama di daerah kotamadya, perbedaannya cukup besar.

Secara total terlihat TPT perempuan sebesar 6,93 % dan TPT laki-laki sebesar 4,76 %. Daerah Kotamadya Padang menempatkan urutan TPT tertinggi sebesar 13,60 %, disusul kemudian Kotamadya Solok sebesar 8,56 %. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang merupakan pusat perdagangan dan pemerintahan ternyata cukup tinggi TPT nya . Apalagi bila dikaji bahwa, lebih dari separoh daerah perkotaan adalah penduduk kotamadya Padang.

Selain itu pada tabel 4.2 suatu catatan penting yang perlu dikemukakan adalah angka pengangguran terbuka sangat tinggi bagi kelompok usia muda dibawah usia 25 tahun. Hal itu berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita. Sebenarnya tingginya angka itu dapat dipahami mengingat bahwa penduduk pada usia itu sebagian masih berada dalam transisi " dunia sekolah " dan " dunia kerja ", suatu gejala yang ditemukan di hampir semua negara, termasuk dinegara-negara yang sudah maju.

**Angka Pengangguran Terbuka Sangat Tinggi Bagi Kelompok Usia Muda ± di Bawah Usia 25 Tahun**

Dalam masa transisi seperti itu terkadang banyak yang " mampu " untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi (termasuk mencari pekerjaan) karena memperoleh dukungan orang tua, tetapi lebih banyak lagi yang tidak "mampu" dan terpaksa mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya.

Tabel 4.2.  
Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT )  
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 1998

Kelompok Umur	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
10 - 14	5.91	9.2	7.12
15 - 24	15.87	21.20	18.04
25 - 44	0.46	4.99	5.28
45 - 54	0.46	1.43	0.62
55 +	0.48	0.44	0.47
Sumatera Barat	4.76	6.93	5.64

## RINGKASAN DATA

Data Penduduk Sumatera Barat 1998	Susenas	Proyeksi
<b>Laki-laki (ribuan)</b>	2162.2	2204.7
Perempuan (ribuan)	2311.0	2326.4
Total (ribuan)	4473.2	4531.1
Laju Pertumbuhan Penduduk 1997-1998 (%)	1.74	1.45
<b>Penduduk Usia Kerja (10 Tahun keatas)</b>		
Laki-laki (ribuan)	1641.8	1727.7
Perempuan (ribuan)	1829.2	1867.6
Total (ribuan)	3471.0	3595.3
<b>Penduduk Angkatan Kerja</b>		
Laki-laki (Ribuan)	1106.2	1136.1
Perempuan (Ribuan)	750.9	875.8
Total (Ribuan)	1857.1	2011.9
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>		
Laki-laki (%)	67.38	65.76
Perempuan (%)	41.05	46.89
Total (%)	53.51	55.96
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>		
Laki-laki (%)	4.76	-
Perempuan (%)	6.93	-
Total (%)	5.64	-
<b>Setengah Pengangguran</b>		
Laki-laki (%)	39.27	-
Perempuan (%)	63.03	-
Total (%)	48.74	-

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 1995 Profil Kependudukan Indonesia Berdasarkan Data SUPAS 1995, Jakarta.

Badan Pusat Statistik ( Kantor Statistik Propinsi Sumatera Barat ), Survei Sosial Ekonomi Nasional 1998, Sumatera Barat.

Clark, C, 1940, The Conditions of Economic Progress, London, Mac Milan.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, 1982, Resume Beberapa Hasil Penelitian di Bidang Ketenagakerjaan, Jakarta.

Durand, J.D, 1975, The Labor Force in Economic Development: a Comparison of International Census Data 1964 - 1966. New Jersey, Princeton University Press.

Galenson, W, 1963, Economic Development and The Sectoral Expansion of Employment, International Labor Review, Vol 87 : 504 - 519.

Jones, G. dan B. Supratilah, 1976, Undertilization of Labor in Palembang and Ujung Pandang, Bulletin of Indonesia Economic Studies, 12 ( 2 ) : 30 - 57.

Kuznets, S, 1957, Quantitative Aspects of The Economic Growth of Nation : II Industrial Distribution of National Product and Labor Force, Economic Development and Cultural Change, 5 (4), Part 2 : 1 - 111.

Oberai, A.S, 1978, Changes in The Structure of Employment with Economic Development, Geneva, International Labor Office.

Simanjuntak, P.J, 1981, Ekonomi Tenaga Kerja, Jakarta . Naskah.

Squire, Lyn, 1981, employment Policy in Developing Countries : a Survey of Issues and Evidence, New York, Oxford University Press.

Turnham, D, 1971, The Employment Problem in less Developed Countries : a Review of Evidence. Paris, Organization for Economic Co-operation and Development Employment, series no. 1.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs.

1962, Sex and Age patterns of Participation in Economic Activities, New York, Demographic Aspects of Man Power Report no. 1.

1968, Methods of Analyzing Census Data on Economic Activities of The Populations, Chapter III. New York.

<https://sumbar.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 48, Telp. 442158 - 60  
Fax. 442161, Padang - 25135  
E-mail: bpssumbar@padang.wasantara.net.id

BPS

Ringkasan Statistik Informasi Ketersediaan 1998 diterbitkan  
oleh Buletin Statistik Kependudukan, Sosial, Ketersediaan,  
Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, BPS Propinsi  
Sumatera Barat merupakan lembaga resmi yang  
mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan statistik di daerah,  
dengan tugas utamanya yakni menyediakan data bagi pemerintah  
dan masyarakat.

Ringkasan Statistik ini menyajikan tentang Informasi  
Ketersediaan Sumatera Barat yang menggambarkan struktur  
dan kondisi ketersediaan untuk pengembalian kebutuhan dan  
laba perusahaan berbagai program. Dengan harapan dapat  
diambil data ketersediaan yang up to date, seperti: Kondisi  
Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran,  
Lapangan Kerja, dan Status Pekerjaan.

DATA KETENAGAKERJAAN

W